



Judul : Tiga skema tenaga honorer pemilu
Tanggal : Kamis, 22 Juni 2023
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 3

Tiga Skema Tenaga Honorer Pemilu

Pembahasan terus dilakukan untuk menghasilkan jalan tengah agar tidak terjadi kekacauan dalam proses atau tahapan Pemilu 2024.

Tri SUBARKAH

subarkah@mediaindonesia.com

KETUA Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkap tiga skema penentuan nasib 7.000 tenaga honorer pada lembaganya yang bakal dihapus saat kampanye Pemilu 2024 dimulai.

Tiga skema itu muncul seusai pihaknya bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau PAN-Rebiro Azwar Anas.

Pertama, ribuan tenaga honorer itu diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dengan kriteria khusus. Kedua, diangkat menjadi PPPK ataupun pegawai negeri sipil (PNS). "Ketiga, diperpanjang masa honorernya sampai dua tahun ke depan," aku Bagja saat ditemui di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, kemarin.

Bagja tak menyoalkan skema apa yang bakal ditentukan Kemenpan-Rebiro sebab semua skema itu dinilai telah mengakomodasi nasib tenaga ASN di institusi yang dipimpinya.

Bawaslu berpotensi kekurangan 7.000 tenaga honorer untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu 2024, khususnya selama masa kampanye jika tenaga honorer dihapus. Hal serupa juga dialami Komisi Pemilihan Umum yang potensial kehilangan 7.551 pegawai non-ASN atau tenaga honorer.

Untuk itulah, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat

(JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan tenaga honorer saat ini yang bekerja pada penyelenggara pemilu sangat dibutuhkan, mengingat pengalaman mereka bekerja pada pemilu sebelumnya.

Mereka juga dinilai telah memahami dinamika dan tantangan untuk tetap menjaga agar pemilu berjalan secara demokratis. "Setidaknya pemerintah dapat membuat suatu kebijakan khusus yang dapat mempertimbangkan keberadaan tenaga honorer di lingkungan penyelenggara pemilu setidaknya selama pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak 2024," kata Mita melalui keterangan tertulis, kemarin.

Jalan tengah

Dalam kesempatan terpisah, Menpan-Rebiro Azwar Anas mengatakan pihaknya sedang menggodok jalan tengah untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer. Saat ini, ada 2,4 juta tenaga honorer yang tersebar di seluruh instansi pemerintahan di Indonesia.

"Nanti akan ada kebijakan, termasuk afirmasi kebijakan tidak boleh ada PHK massal, tapi tidak ada pembengkakan anggaran. Kita mencari solusi jalan tengah," tegasnya.

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri Benni Irwan mengatakan pembahasan terus dilakukan untuk menghasilkan jalan tengah agar tidak terjadi kekacauan dalam proses atau tahapan Pemilu 2024.

Anggota Komisi II DPR RI Guspari Gaus mengatakan pemerintah tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) para non-ASN. Alih-alih status mereka ditingkatkan menjadi PPPK.

"Oleh karena itu, tentu mereka (tenaga honorer non-ASN) harus meningkatkan profesionalitas, dedikasi, kualitas daripada kemampuan, mengubah *mindset*, harus melayani. Ini yang diharapkan," jelasnya kepada *Media Indonesia*. (Sru/P-3)